

SKRIPSI

**ANALISIS PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MAMUJU**

***ANALYSIS OF REGIONAL-OWNED ENTERPRISES (BUMD)
INCOME IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME
(PAD) IN MAMUJU REGENCY***



WISTA AMILTI

C02 20 511

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

**ANALISIS PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MAMUJU**



**WISTA AMILTI
C02 20 511**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

Taufik Hidayat B. Tahawa, S.E., M.Ak
NIP.19930820 201903 1 016

Pembimbing II

Hisyam Ichsan, S.E., M.Si
NIP.19930107 202203 1 010

Menyetujui,
Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M., S.Pd., M.Ak
NIP.19831203 201903 2 006

ANALISIS PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MAMUJU

Dipersiapkan dan disusun oleh:

WISTA AMILTI
C02 20 511

Telah diuji dan diterima panitia ujian
Pada Tanggal 26 Mei 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

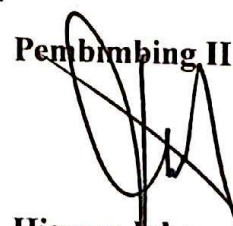
Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Taufik Hidayat B.Tahawa, S.E., M.Ak	Ketua	
2. Hisyam Ichsan, S.E., M.Si	Sekretaris	
3. Prof. Dr.Dra. Enny Radjab, M.AB	Penguji I	
4. Muhammad Ihsan Ansari, SE, M.Ak	Penguji II	
5. Sufyan Amirullah, SE, M.Ak	Penguji III	

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I


Taufik Hidayat B. Tahawa, S.E., M.Ak
NIP.19930820 201903 1 016

Pembimbing II


Hisyam Ichsan, S.E., M.Si
NIP.19930107 202203 1 010

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi



Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP: 19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wista Amilti

NIM : C02 20 511

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**"ANALISIS PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPAEN MAMUJU"**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 20 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan


Wista Amilti


ABSTRAK

WISTA AMILTI. Analisis Pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Mamuju, Dibimbing Oleh Taufik Hidayat B. Tahawa, Dan Hisyam Ichsan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang bersifat dokumentasi dan atau dokumen. Lokasi penelitian dilaksanakan di PDAM Tirta Manakarra Mamuju yang berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin No. 35, Mamuju. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang sudah ada sebelumnya. Data yang dikelola dalam Laporan Keuangan Perusahaan pada Tahun 2019-2023 terbaru. Hasil analisis menunjukkan bahwa, pendapatan BUMD dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Mamuju mulai dari tahun 2019-2023 memberikan kontribusi pendapatan yang cukup baik terhadap PAD yaitu mencapai 83% penerimaan pendapatan. Hal ini terjadi dikarenakan faktor BUMD yang ada di Kabupaten Mamuju terbilang sangat kurang sehingga tidak mampu memberikan kontribusi yang sesuai dengan target penerimaan. Oleh karena itu pendapatan BUMD dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Mamuju tidak mencapai target penerimaan daerah namun memberikan pendapatan yang cukup maksimal untuk PAD.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

WISTA AMILTI. *Analysis of Regional-Owned Enterprises (BUMD) Revenue in Increasing Regional Original Income (PAD) in Mamuju Regency, Supervised by Taufik Hidayat B. Tahawa and Hisyam Ichsan.*

This study aims to determine the revenue of Regional-Owned Enterprises (BUMD) in Increasing Regional Original Income (PAD) in Mamuju Regency. This research approach uses a Quantitative approach method which aims to describe the results of research conducted by researchers which are documentary and/or documents. The location of the research was carried out at PDAM Tirta Manakarra Mamuju which is located on Jl. Sultan Hasanuddin No. 35, Mamuju. The data source used in the study is pre-existing data. Data managed in the Company's Financial Report for the latest 2019-2023. The results of the analysis show that BUMD revenue in increasing PAD in Mamuju Regency from 2019-2023 has contributed quite good revenue to PAD, reaching 83% of revenue receipts. This is because the BUMD factor in Mamuju Regency is very lacking so that it is unable to provide a contribution in accordance with the revenue target. Therefore, BUMD revenue in increasing PAD in Mamuju Regency does not reach the regional revenue target but provides sufficient maximum revenue for PAD.

Keywords : *Regional-Owned Enterprises (BUMD), Regional Original Revenue (PAD)*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 membahas mengenai pembuatan aturan hukum, menjelaskan bahwa diberikan ruang bagi distrik lokal untuk menetapkan peraturan distrik lokal dalam rangka menyelenggarakan swakelola daerah. Dalam pelaksanaan swakelola daerah, pemerintah daerah dapat mengambil kewenangan dalam mengembangkan daerah menjadi daerah yang mandiri dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penerimaan asli daerah terbagi dari beberapa asal, di antaranya berasal dari pemerintah pusat serta Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pengelolaan aset daerah yang terpisah, adalah penghasilan yang berasal dari perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD itu sendiri merupakan bagian dari asal kekayaan daerah yang dipisahkan dengan tujuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa menjadi peningkat Penghasilan Asli Daerah.

Permasalahan yang seringkali terjadi di sebuah daerah adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh minimnya penerimaan PAD. Permasalahan tersebut dapat memberikan dampak langsung pada seluruh kinerja dalam alokasi pendanaan. Minimnya PAD dalam suatu daerah dapat

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat akibat kesulitan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang memadai.

Banyak kendala yang di hadapi dalam melakukan peningkatan PAD diantaranya adalah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kurang optimalnya alokasi hasil pendapatan BUMD ke PAD. Minimnya level keterbukaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini pastinya sangat di sayangkan, sebab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sudah memanfaatkan dana negara guna mendanai kegiatan perusahaan. Warga perlu memahami kegiatan perusahaan, tentu dalam batasan yang tidak melanggar tingkat kerahasiaan lembaga usaha. Di ketahui bahwa hanya 21 dari 57 BUMD yang menyajikan laporan keuangan BUMD kepada publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak tahu bagaimana kondisi BUMD sesungguhnya, khususnya terkait dengan masalah keuangan (Donal, dkk, 2019). Dengan pengelolaan secara professional sejalan pada prinsip manajemen lembaga usaha yang efektif, BUMD yang adalah lembaga yang yang didirikan dan di miliki oleh pemerintah daerah sebagai salah satu penghasil PAD akan menghasilkan secara maksimal.

Beberapa Kekayaan sumber daya alam yang di miliki Kabupaten Mamuju, sejumlah pemerintah daerah mendukung akan terbentuknya BUMD di Kabupaten Mamuju untuk menjadi kontributor utama dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada tahun 2019 dikabarkan dana penyertaan modal BUMD mencuat ke publik setelah dikabarkan belum dipertanggungjawabkan. Muhammad Idris selaku sekretaris Provinsi Sulawesi Barat membenarkan bahwa benar terdapat laporan yang diperoleh mengenai dana penyertaan modal yang

masih belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola sebelumnya. Pada kutipan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di akhir tahun 2021, pernah menyampaikan bahwa BUMD telah resmi dibubarkan gara-gara tidak memberikan kontribusi ke daerah serta kinerja para pelaku BUMD tidak maksimal (BPK Prov. Sulawesi Barat, 2022).

Perumda Kabupaten Mamuju pada pasal 6 menyebutkan bahwa guna meraih maksud serta sasaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (1), Perumda Manakarra Keren menjalankan aktivitas bisnis, yaitu: Layanan; Pertanian; Perikanan serta Kelautan; Kehutanan dan Perkebunan; Industri; Perdagangan; Pertambangan; serta/atau Energi, Minyak, dan Gas. Di Kabupaten Mamuju beberapa BUMD telah dibubarkan. Salah satunya adalah PT Mamuju Raya dibubarkan karena berbagai alasan termasuk manajerial dan keuangan, PT Mamuju Sejahtera yang disebabkan oleh masalah manajemen, kinerja yang kurang baik, atau ketidak mampuan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, PT Mamuju Energi dan Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang tidak beroperasi secara efektif. Perusahaan Pasar Umum Daerah yang menaungi pasar tradisional dan tempat perdagangan, BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Mamuju, dan PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah) yaitu Tirta Manakarra Mamuju merupakan BUMD yang tetap beroperasi dan memberikan kontribusi signifikan bagi daerah.

Dalam kaitannya dengan teori stakeholder bahwa perusahaan atau usaha yang dijalankan oleh pemerintah harus mampu memberikan kontribusi yang baik bagi daerah dan masyarakat. Pemerintah yang menjadi pemangku kepentingan

dalam proses pengelolaan pendapatan daerah diberikan kewenangan dalam meningkatkan hasil daerah khususnya dalam meningkatkan pendapatan BUMD.

Menurut penelitian terdahulu (Ahmad, dkk, 2022), bahwasanya PDAM Tirta Batanghari sebagai salah satu BUMD yang dapat meningkatkan Pendapatan Murni daerah tidak tergolong dalam jenis Perusahaan daerah yang merupakan asal Penghasilan Murni daerah Kabupaten Batang Hari. Menurut peneliti terdahulu (Nurmiati, dkk, 2019), Kenaikan pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar dalam lima tahun terakhir (2014-2018) menunjukkan perubahan naik turun setiap tahunnya dengan rata-rata mencapai 110,68%. Selanjutnya, level keberhasilan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama lima tahun terakhir rata-rata berada di angka 90,49 atau termasuk dalam kategori berhasil. Sementara itu, pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dalam lima tahun terakhir rata-rata sebesar 1,73 atau tergolong dalam kategori sangat rendah. Menurut peneliti terdahulu (Utri, 2023), Sumbangan perolehan dari keuntungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD Kota Pontianak masih amat rendah, dengan rata-rata dalam lima tahun hanya mencapai 4,21% saja.

Kemudian, dipahami bahwa dari tiga penelitian yang dilakukan terdapat pendapatan BUMD dalam meningkatkan PAD tidak maksimal. Hal ini juga terjadi fluktuasi pendapatan pada setiap tahunnya. Oleh sebab itu Pendapatan BUMD di Indonesia perlu ditingkatkan untuk kemaksimalan PAD. Dalam hal tersebut peneliti memberikan gambaran mengenai Pendapatan BUMD yang ada di Kabupaten Mamuju untuk memastikan kemaksimalan PAD wilayah tersebut.

Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selaras dengan kapasitas daerah, dan Pemerintahan daerah Kabupaten Mamuju seharusnya lebih meningkatkan realisasi anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya atau meninjau kembali pada tahap perencanaan anggaran agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju lebih optimal serta pastinya sesuai tujuan (Afif, Rosma, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian yaitu **“ANALISIS PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MAMUJU”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sejalan pembahasan pada uraian dari problematika yang akan diteliti, maka dapat di temukan rumusan masalah yang akan menjadi dasar penelitian yaitu Bagaimana pendapatan BUMD dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Mamuju?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini fokus yang menjadi target yang akan dilakukan ialah Untuk menganalisis pendapatan BUMD dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Mamuju.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dipetik dalam studi ini menurut masalah yang terjadi adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat studi teoritis diharapkan bisa bermanfaat dalam perluasan wawasan sekaligus peningkatan pemahaman terkait kajian spesifik. Pada temuan studi ini menjadi tombak pengukuran bagi pendapatan daerah yang dapat memberikan manfaat bagi Pemda dalam menstabilkan anggaran.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang dapat diperoleh dalam studi ini adalah :

- a. Bagi Pemda, studi ini diekspektasikan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan Pendapatan dan menstabilkan anggaran.
- b. Bagi pemilik usaha, studi ini diekspektasikan bisa menolong dalam peningkatan laba usaha.
- c. Bagi masyarakat, studi ini diekspektasikan bisa mendorong PAD dan masyarakat mendapatkan pembangunan yang merata dan dapat menyejahterakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Teoritik

2.1.1 Teori Stakeholder

Sekelompok orang, atau penduduk yang mempunyai keterkaitan serta kepedulian terhadap sebuah lembaga baik secara penuh maupun sebagian, dianggap sebagai pemangku kepentingan menurut teori stakeholder. Menurut teori pemangku kepentingan, suatu perusahaan harus mampu memberi manfaat bagi para pemangku kepentingannya dan tidak hanya bertindak demi kepentingan terbaiknya sendiri. Oleh karena itu, dukungan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan suatu organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan organisasi atau lembaga untuk tetap eksis. Oleh karena itu, kemampuan organisasi publik atau swasta untuk memastikan kebahagiaan para pemangku kepentingan utamanya masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan mereka. (Jhon, dkk, 2022).

Karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, maka pemerintah harus mampu mengelola kekayaan dan pendapatan daerah sebagaimana diperintahkan dalam Konstitusi Negara 1945 untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 33, semua kekayaan hayati yang dikendalikan oleh otoritas wajib digunakan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, termasuk belanja modal yang bersumber dari pendapatan daerah. Sebagai pemangku kepentingan atau sebagai masyarakat, sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung. Kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan

akan terpengaruh jika pungutan, biaya layanan, dana penyaluran umum, serta dana penyaluran khusus diperuntukkan bagi pengeluaran investasi (Jhoni, dkk, 2022).

Mustahil untuk memisahkan keberadaan perusahaan di suatu area dari keberadaan para pemangku kepentingannya. Pihak-pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh bisnis dikenal sebagai pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan ini dipisahkan menjadi dua kategori: pemangku kepentingan internal, yang meliputi karyawan dan pemegang saham. Selain itu, pemangku kepentingan eksternal meliputi kreditor, lingkungan, masyarakat, konsumen, pemerintah, organisasi nonpemerintah, pemasok, dan orang lain yang memiliki kepentingan dalam bisnis atau pemerintah (Andy, 2022).

Pendapatan sebuah BUMD menjadi sebuah kepentingan umum yang harus di ketahui oleh masyarakat dan lebih khususnya dalam lingkup seluruh pemerintahan. Dalam kaitannya dengan stakeholder bahwa perusahaan atau usaha yang dijalankan oleh pemerintah harus mampu memberikan kontribusi yang baik bagi daerah dan masyarakat. Pemerintah yang menjadi pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan pendapatan daerah diberikan kewenangan dalam meningkatkan hasil daerah khususnya dalam meningkatkan pendapatan BUMD. BUMD yang diperlukan mampu memberikan kontribusi yang maksimal kedalam PAD untuk demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. Teori Pendapatan

Teori pendapatan merupakan konsep yang digunakan untuk menjabarkan bagaimana pendapatan di peroleh dan di bagikan dalam suatu perekonomian. Ada berbagai teori yang berfokus pada asal-usul pendapatan, faktor-faktor yang

memengaruhinya, serta bagaimana pendapatan tersebut di distribusikan. Berikut adalah beberapa teori pendapatan yang umum dalam ekonomi:

2.1.2.1 Teori Pendapatan Klasik

Teori Klasik dalam Keuangan merujuk pada kumpulan gagasan serta prinsip keuangan yang dirancang oleh beberapa pakar ekonomi ternama pada era ke-18 serta ke-19, di antaranya Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. Pendekatan ini menyatakan bahwa mekanisme tanpa intervensi serta kompetisi merupakan faktor utama dalam mengendalikan pembuatan serta pendistribusian kekayaan secara optimal, sekaligus mewujudkan kemakmuran bagi populasi.

Pendekatan Tradisional dalam Keuangan juga menyoroti signifikansi keleluasaan perorangan dalam menentukan pilihan finansial. Otoritas hanya perlu berperan dalam regulasi terbatas, seperti menjaga kepemilikan aset serta memastikan ketertiban penduduk. Pendekatan ini pun menggarisbawahi urgensi efisiensi kerja, penyesuaian dana, serta penanaman modal guna meraih perkembangan finansial yang terus-menerus.

Pendekatan ini menyoroti urgensi perdagangan tanpa batasan, rivalitas, serta keleluasaan perorangan dalam mengelola pembuatan serta pendistribusian kekayaan secara optimal, sekaligus mewujudkan kemakmuran bagi populasi. Walaupun tanggapan negatif terhadap pendekatan ini terus bermunculan, gagasan-gagasan tradisional tetap

menjadi landasan dalam kajian keuangan kontemporer serta membuka peluang bagi pertumbuhan konsep ekonomi yang lebih mendalam serta sesuai dengan konteks sosial dan politik yang berubah (“Teori Klasik”, 2023, pp. 442-930).

2.1.2.2 Teori Pendapatan Marxis

Teori Marxis menyampaikan bahwa pembagian penghasilan dipengaruhi oleh kepemilikan elemen produksi, yaitu pekerja serta aset. Berdasarkan gagasan ini, pekerja cenderung memperoleh bayaran yang kecil karena laba dari aset lebih besar dibandingkan dengan gaji pekerja.

Pandangan ini bersumber dari pemikiran Karl Marx (1867), yang hadir di ranah diskusi guna menjelaskan bahwa terdapat proses pemanfaatan tenaga kerja dalam tahapan produksi, sebab teori ekonomi klasik tidak menguraikan eksploitasi pekerja. Menurutnya, sistem keuangan menentukan kebijakan pemerintahan serta perekonomian mana pun juga berpengaruh terhadap unsur lain dalam komunitas, seperti kepercayaan, etika, dan sebagainya. Ekonomi, menurut Karl Marx (1867), berfungsi sebagai penggerak bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, model produksi di sini merujuk pada kesatuan menyeluruh antara tenaga produktif serta interaksi sosial dalam produksi. Esensi dari pemikiran Marx (1867) adalah kajian mendalam mengenai kelebihan serta kekurangan sistem kapitalisme. Marx (1867) menyatakan bahwa seluruh nilai suatu barang dagangan ditentukan oleh kandungan usaha tenaga kerja—baik usaha langsung maupun usaha tidak langsung yang tercakup

dalam perangkat produksi. Sebagai contoh, nilai sebuah pakaian berasal dari kerja para buruh industri tekstil yang dikombinasikan dengan nilai dari individu yang menciptakan alat tenun. Dengan mengaitkan seluruh nilai hasil produksi ke usaha pekerja, Marx berupaya menunjukkan bahwa keuntungan merupakan bagian dari hasil produksi yang di produksi oleh pekerja tetapi di terima oleh kapitalis sama dengan pendapatan diterima di muka. Pendapat Marx (1867) bahwa ketidakadilan pemilik modal memperoleh penghasilan terlebih dahulu, melegitimasi pemindahan hak milik industri serta sarana produksi lainnya dari pemilik modal kepada tenaga kerja (“Marxis”, 2022).

2.1.2.3 Teori Pendapatan Marginal (Teori Neoklasik)

Di ranah ekonomi, gagasan neoklasik telah menjadi salah satu landasan utama yang membangun wawasan kita mengenai mekanisme perdagangan serta pendistribusian kekayaan. Walaupun tampak kompleks, gagasan ini sejatinya menitikberatkan pada prinsip mendasar yang memengaruhi aktivitas ekonomi harian. Gagasan neoklasik muncul pada penghujung era ke-19 sebagai kelanjutan sekaligus penyempurnaan dari pendekatan ekonomi tradisional. Pemikiran ini menitikberatkan pada bagaimana individu menentukan pilihan keuangan secara logis serta bagaimana perdagangan mencapai titik keseimbangan melalui sistem penyesuaian harga.

Konsep finansial terus mengalami perubahan, menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan serta wawasan manusia mengenai

perdagangan dan kemakmuran. Salah satu gagasan yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masa kini adalah pemikiran Neoklasik. Pendekatan neoklasik dalam keuangan berakar dari evolusi pemikiran finansial yang berlangsung pada penghujung era ke-19 hingga awal abad ke-20. Pendekatan ini lahir sebagai tanggapan terhadap kekurangan serta batasan dari konsep ekonomi tradisional yang sebelumnya lebih mendominasi (Adila, 2023, februari 4).

Teori ini didasarkan pada prinsip marginalisme, yang dikembangkan oleh ekonom seperti Alfred Marshall (1834-1910) dan Leon Walras (1842-1924). Menurut teori ini, pendapatan dihasilkan berdasarkan produktivitas marginal dari setiap faktor produksi (kerja, tanah, dan modal).

Pendapatan Tenaga Kerja: Diukur berdasarkan produktivitas marginal tenaga kerja, yaitu kontribusi tambahan yang di berikan oleh satu unit tenaga kerja tambahan terhadap output total. Pendapatan Modal: Diukur berdasarkan produktivitas marginal modal, yaitu kontribusi tambahan dari setiap unit modal yang digunakan dalam produksi. Teori ini menyatakan bahwa setiap faktor produksi akan dibayar sesuai dengan kontribusinya terhadap hasil produksi, yaitu nilai marginal produk yang di hasilkan oleh faktor tersebut (Adila, 2023, februari 2024).

2.1.2.4 Teori Pendapatan Keynesian

John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris, menciptakan dan menyempurnakan teori Keynesian, yang juga dikenal sebagai

Keynesianisme, pada tahun 1936. Menurut gagasan ini, permintaan agregat suatu negara akan berdampak pada pasar tenaga kerja, inflasi, dan hasil produksi. Ia pertama kali menyampaikan tesis ini dalam bukunya tahun 1936 *The General thesis of Employment, Interest, and Money*. Menurut gagasan ini, permintaan agregat akan terus berubah seiring waktu, yang menyebabkan keadaan ekonomi suatu negara mengalami berbagai tahap, termasuk resesi, depresi, atau ledakan ekonomi. Penganut Keynesian berpendapat bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian diperlukan untuk mengurangi risiko siklus ekonomi ini.

Teori efek pengganda merupakan salah satu teori kebijakan fiskal yang berawal dari Keynesianisme. Menurut argumen ini, paket stimulus pemerintah dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian. Selain itu, Keynes menganjurkan masyarakat untuk meningkatkan kecenderungan mengonsumsi marjinal (*Marginal Propensity Consume* (MCP)). MPC adalah jumlah pendapatan yang dibelanjakan untuk konsumsi. Keynes berpendapat bahwa tabungan yang berlebihan juga akan berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan. (Ferichatul, 2024, juli 10).

2.1.2.5 Teori Pendapatan Fungsional

Teori ini berkembang dalam tradisi ekonomi klasik dan neoklasik, terutama dalam teori distribusi pendapatan. Secara umum, teori ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendapatan dibagi antara beragam elemen produksi serta fungsi masing-masing dalam tahapan pembuatan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan pemikiran para ekonom, teori ini mengalami penyempurnaan dan pembaruan.

Teori ini mengemukakan bahwa pendapatan yang diterima dalam perekonomian dibagi berdasarkan fungsinya. Ada beberapa jenis pendapatan yang diterima oleh berbagai agen dalam perekonomian:

1. Upah (Tenaga Kerja): Pendapatan yang diperoleh oleh tenaga kerja sebagai balasan atas tenaga kerja yang diberikan.
2. Sewa (Tanah): Pendapatan yang diterima oleh pemilik tanah sebagai imbalan atas penggunaan sumber daya alam.
3. Bunga (Modal): Pendapatan yang diperoleh pemilik modal sebagai imbalan atas penggunaan modal dalam produksi.
4. Keuntungan (Perusahaan): Pendapatan yang diterima oleh pengusaha atau pemilik usaha sebagai imbalan atas usaha dan risiko yang mereka tanggung dalam proses produksi.

2.1.2.6 Teori Pendapatan Residual

Ungkapan pendapatan sisa berawal dari bidang keuangan serta pencatatan, dan telah dimanfaatkan selama lebih dari seratus tahun untuk menjelaskan keuntungan yang tetap setelah seluruh pengeluaran diselesaikan. Alfred Marshall (1842-1924) merupakan salah satu ahli ekonomi paling berpengaruh di eranya, serta dikenal luas atas sumbangsihnya dalam kemajuan teori keuangan neoklasik. Dalam tulisan utamanya, *Economic Principle*, yang awalnya dirilis pada tahun 1890,

Marshall mengenalkan gagasan pendapatan sisa sebagai metode dalam menilai tingkat keuntungan dari sebuah penanaman modal atau usaha.

Pendapatan sisa atau laba residual merupakan ungkapan dalam dunia finansial yang merujuk pada pemasukan yang diperoleh seseorang atau perusahaan dari suatu aset setelah seluruh pengeluaran operasional serta kewajiban utangnya terpenuhi. Keuntungan dari pendapatan sisa ialah menyediakan arus pemasukan yang stabil, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan usaha, menyisihkan dana untuk masa pensiun, atau mengalokasikan kembali ke dalam usaha maupun investasi. Mendapatkan laba residual bertujuan untuk membangun kekayaan jangka panjang dan stabilitas keuangan. Dengan berinvestasi pada aset yang menghasilkan pendapatan pasif, individu dan bisnis dapat membangun aliran pendapatan tetap yang dapat digunakan Untuk menopang pola hidup mereka, menyelesaikan kewajiban finansial, serta menyimpan dana untuk waktu yang akan datang (Sugi, Januari 4, 2024).

2.1.2.7 Teori Pendapatan Berdasarkan Human Capital

Gagasan mengenai *human capital* atau modal manusia Telah mengalami perkembangan di berbagai negara, namun gagasan-gagasan ini benar-benar terbentuk sebagai konsep dalam pemikiran Barat pada era 1960-an. Sumbangan teori modal manusia terhadap bidang ekonomi serta budaya telah diterima secara luas. Teori ini tumbuh berdasarkan konsep pertumbuhan ekonomi di dunia Barat serta penelitian mengenai tindakan manusia. Faktor yang menentukan kemajuan ekonomi di negara-negara

Barat telah bergeser dari aset fisik menuju modal manusia, dan perhatian terhadap perilaku individu telah menjadi fokus dari sudut pandang akademis maupun industri sejak munculnya pendekatan hubungan manusia. Pembentukan serta pengembangan teori modal manusia telah diperkenalkan dan diterapkan di negara-negara Barat, sementara hasil penelitian mengenai modal manusia beserta teori yang berkaitan telah memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, ekonomi, serta ekspansi perusahaan. Saat ini, terjadi beberapa perubahan dalam tatanan ekonomi serta sosial. Untuk menghadapi perubahan tersebut, teori modal manusia menawarkan landasan konseptual yang kuat guna mendukung struktur sosial ekonomi serta kemunculan perusahaan di tengah proses reformasi, dengan tujuan membangun sistem yang efektif dalam investasi dan pengembangan modal manusia guna mempromosikan pengembangan perusahaan, evolusi sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Stockely (2003), sebagaimana dikutip oleh Winarno et al. (2012), modal manusia merupakan aset yang krusial dan memiliki esensi penting, berkontribusi terhadap perkembangan serta kemajuan, serupa dengan aset fisik seperti peralatan dan modal usaha lainnya. Berdasarkan konsep teori modal manusia, hasil utama dari investasi pada individu adalah transformasi yang tercermin pada tingkat personal dalam bentuk peningkatan performa, pada tingkat organisasi berupa peningkatan efisiensi dan keuntungan, serta pada tingkat masyarakat dalam bentuk manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh komunitas (Burhanudin, 2021).

2.1.2.8 Teori Pendapatan dan Keadilan Sosial

Teori ini berfokus pada bagaimana pendapatan harus di distribusikan untuk menciptakan keadilan sosial. Beberapa pendekatan yang sering di bahas dalam teori ini meliputi pendapatan dasar universal, redistribusi pajak, dan program kesejahteraan sosial. Teori ini berargumen bahwa pendapatan harus di distribusikan secara lebih merata agar kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi, dan bahwa kebijakan pemerintah harus mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3. Analisis Pendapatan

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Ahmad, dkk,2022) Berikut pengertian analisis menurut para ahli :

- a. Menurut Nana Sudjana (2016:27), analisis merupakan suatu proses memilah suatu kesatuan menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian agar struktur atau hierarkinya dapat terlihat dengan jelas. Sementara itu, menurut Abul Majid (2013:54), analisis diartikan sebagai kemampuan untuk memecah suatu kesatuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi suatu keseluruhan menjadi sub-sub atau bagian-bagian, serta membedakan dua hal yang tampak serupa.
- b. Menurut Dwi Prastowo, analisis didefinisikan sebagai proses memecah suatu topik menjadi berbagai elemen, menelaah masing-masing bagian tersebut, serta mengkaji keterkaitan antar bagian guna memperoleh

pemahaman yang akurat dan menginterpretasikan makna secara menyeluruh

- c. Menurut Wiradi, analisis adalah suatu proses yang melibatkan tindakan memisahkan, menguraikan, serta membedakan suatu objek untuk diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu, kemudian dilakukan penafsiran makna serta hubungan yang terkait.

Pendapatan, yang memiliki beberapa nama, termasuk penjualan, kompensasi, bunga, dividen, royalti, dan sewa, didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) sebagai pendapatan yang dihasilkan dari pelaksanaan operasi bisnis regular (Afandi, 2018).

Sesuai dengan pengertian diatas maka analisis pendapatan adalah suatu hal yang mampu mencari perbedaan antar kegiatan untuk mendapatkan sumber keuntungan bagi sebuah perusahaan yang dapat menambah unit barang/jasa dan juga menambah nilai modal bagi perusahaan. Berikut adalah sumber dan penilaian pendapatan :

- a. Sumber Pendapatan

Pendapatan (Revenue) suatu entitas bisnis tidak hanya berasal dari aktivitas utama, tetapi juga diperoleh melalui transaksi lainnya. Oleh karena itu, pendapatan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu Pendapatan Operasional (Operating Revenue) dan Pendapatan Non Operasional (Non Operating Revenue). Pendapatan Operasional (Operating Revenue) merujuk pada hasil yang diperoleh secara langsung dari aktivitas inti perusahaan sebagai bagian utama dari usaha yang dijalankan. Pendapatan operasional

menjadi indikator yang menunjukkan seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan keuntungan. Sementara itu, Pendapatan Non Operasional (Non Operating Revenue) adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari sumber yang tidak berkaitan dengan aktivitas utama yang dijalankan dalam operasionalnya.

b. Penilaian Pendapatan

Standar akuntansi menyediakan panduan utama dalam penilaian yang dapat diterapkan untuk menetapkan jumlah rupiah yang dihitung dan dicatat pertama kali dalam sebuah transaksi, serta menentukan besaran rupiah yang harus dicantumkan dalam suatu akun pada laporan keuangan. Terdapat empat dasar dalam menilai pendapatan, yaitu biaya historis, biaya saat ini, nilai realisasi atau penyelesaian, serta nilai kini, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Biaya Histori (*Historical Cost*): aset dicatat dengan jumlah pengeluaran uang tunai (atau setara uang tunai) yang dikeluarkan sebesar harga wajar dari kompensasi yang diberikan untuk mendapatkan aset tersebut pada waktu perolehan.
2. Biaya Kini (*Current Cost*): aset dihargai dalam bentuk uang tunai (atau yang setara dengan uang tunai) yang semestinya dikeluarkan jika aset yang serupa atau sebanding diperoleh saat ini.
3. Nilai Realisasi atau Penyelesaian (*Realization/Settlement Value*): aset dijelaskan dalam besaran uang tunai (atau yang setara dengan uang tunai) yang serupa atau sebanding dengan aset saat ini melalui penjualan aset dalam proses pelepasan yang wajar.

4. Nilai Sekarang (*Present Value*): aset diungkapkan berdasarkan arus kas bersih di masa mendatang yang telah didiskontokan ke nilai saat ini dari item yang diantisipasi dapat menghasilkan keuntungan dalam operasional bisnis yang wajar.

2.1.4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

2.1.4.1 Pengertian BUMD

BUMD merupakan salah satu jenis entitas bisnis yang dibentuk oleh pemerintah lokal untuk mengelola aset lokal yang dipisahkan serta memberikan layanan kepada masyarakat. BUMD termasuk dalam bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di tingkat lokal. Keberadaan BUMD berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan serta mendukung pembangunan wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Lokal, BUMD adalah suatu badan usaha yang modalnya secara keseluruhan atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah lokal melalui investasi langsung yang bersumber dari aset lokal yang dipisahkan. BUMD dapat dibentuk perseroan terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Daerah (PD), atau koperasi. BUMD didirikan berdasarkan peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan resmi oleh kepala daerah dengan izin dari DPRD. BUMD dijalankan oleh direksi dan diberhentikan secara langsung oleh kepala daerah. BUMD memiliki kewajiban kepada pemegang saham atau pemilik modal melalui pertemuan umum pemegang saham (RUPS) atau pertemuan anggota.

Perusahaan daerah ialah entitas bisnis milik daerah yang mayoritas atau keseluruhan dananya dikuasai oleh otonomi lokal. Untuk memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah dan pengembangan kemungkinan finansial wilayah mengarah pada komunitas sejahtera dan merata dibentuklah perusahaan daerah (Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1962, bagian 2, pasal 5). Contoh entitas daerah mencakup perusahaan Penyedia Air Minum (PDAM) serta Bank Pembangunan Wilayah (BPD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki posisi yang sangat krusial dan berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan kemandirian daerah. Secara umum, peran BUMD dalam aktivitas ekonomi serta pembangunan daerah dapat ditinjau dari tiga perspektif, yaitu peningkatan produksi, perluasan peluang kerja, serta peningkatan pendapatan. Di sisi lain, BUMD juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, yang pokoknya meliputi: Menjalankan kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi serta pembangunan daerah; menghimpun dana untuk membiayai pembangunan daerah; mendorong keterlibatan masyarakat dalam bidang usaha; serta menjadi pelopor dalam aktivitas dan usaha yang kurang diminati sektor swasta.

Swakelola daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran BUMD dalam meningkatkan dan menopang PAD. Sesungguhnya usaha dan kegiatan yang ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak dahulu sebelum peraturan mengenai pengelolaan mandiri daerah diberlakukan. Guna meraih target maksud BUMD sebagai salah satu

instrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibutuhkan usaha untuk mengoptimalkan BUMD, yakni dengan meningkatkan profesionalisme baik dalam aspek pengelolaan, tenaga kerja, maupun fasilitas dan infrastruktur yang mencukupi sehingga memiliki posisi yang setara dengan kekuatan sektor ekonomi lainnya.

2.1.4.2 Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Daerah

Perseroan daerah terbatas adalah lawan dari perusahaan umum daerah, di mana modalnya terbagi dalam bentuk kepemilikan saham dengan paling sedikit 51% saham dikuasai oleh pemerintah daerah. Tipe pertama dari BUMD adalah perusahaan umum daerah, yakni BUMD yang dananya berasal dari pemerintah daerah namun tidak terbagi ke dalam bentuk saham karena berstatus sebagai perusahaan umum (Bayu PP, 2015).

2.1.4.3 Sumber Modal BUMD

Asal dana BUMD meliputi; alokasi modal daerah yang dalam hal ini merujuk pada APBD, anggaran APBD yang dialokasikan untuk pendanaan modal BUMD serta atau dapat pula berupa piutang kepada BUMD yang dijadikan sebagai alokasi modal daerah, juga perubahan dari utang yang berarti bahwa utang daerah yang telah disalurkan sebagai modal kepada BUMD; utang, pemberian hibah; serta sumber dana lainnya, yang memiliki arti sebagai penambahan modal dari sumber lain yang sesuai aturan pemerintah daerah, modal tersebut contohnya seperti modal dari cadangan, keuntungan revaluasi asset dan Agio saham.

2.1.4.4 Fungsi dan Peranan BUMD

Setiap aktivitas operasional memiliki peran masing-masing, begitu juga dengan BUMD, yang memiliki peran serta fungsi untuk menjalankan aktivitas yang berlandaskan pada keputusan pemerintah daerah terkait ekonomi maupun perkembangan daerah agar lebih berkembang; sebagai penyedia dana/dukungan terhadap pendanaan pembangunan, dalam hal ini keuntungan yang diperoleh akan dapat menambah ke dalam anggaran daerah (PAD); membangkitkan motivasi masyarakat dalam sektor usaha, karena dalam hal ini BUMD berperan dalam menyalurkan pendanaan usaha; serta sebagai produsen barang dan penyedia layanan jasa yang mendukung kebutuhan masyarakat (Faozan, 2021).

2.1.4.5 Tujuan BUMD

Tujuan pembentukan BUMD adalah untuk memberikan keuntungan bagi ekonomi daerah, seperti memperkuat perekonomian daerah sesuai dengan bidang operasional yang dijalankan; dapat memberikan manfaat umum bagi ekonomi daerah, misalnya menyuplai barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah, di mana pengelolaannya berkaitan dengan potensi/sumber daya yang dimiliki daerah dan diatur dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta memperoleh pendapatan/keuntungan yang berkontribusi pada peningkatan keuangan daerah (Wulandari, Iryanie, 2017).

2.1.4.6 Laba BUMD

Manahan P. Tampubolon (2013) mengungkapkan bahwa keuntungan atau pendapatan perusahaan adalah sesuatu yang dihasilkan dari total penjualan setelah dikurangi seluruh pengeluaran operasional. Sementara itu, menurut Soemarsono SR (1999), keuntungan merupakan selisih antara total pemasukan atau pendapatan dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keuntungan diperoleh dari hasil penjualan setelah dikurangi seluruh pengeluaran yang terjadi. Adapun keuntungan dalam konteks BUMD adalah sesuatu yang diberikan oleh individu atau kelompok dalam bentuk kontribusi atau dana yang dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana keuntungan tersebut berasal dari kegiatan operasional BUMD yang berjalan di wilayah tersebut.

2.1.4.7 Ciri-ciri BUMD

Berikut adalah karakteristik BUMD: didirikan oleh pemerintah daerah dan diatur melalui regulasi daerah; pemerintah daerah berperan sebagai pemegang saham dalam struktur permodalan perusahaan; pemerintah memiliki kendali atas seluruh aset dan operasional perusahaan; pemerintah bertindak sebagai pemegang saham dalam struktur permodalan perusahaan; pemerintah memiliki otoritas serta kewenangan dalam menetapkan kebijakan perusahaan; pengawasan dilakukan oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan; berfungsi sebagai penyeimbang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bertujuan untuk

mengembangkan pendapatan asli daerah membiayai pembangunan daerah; dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank; dan dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD (Faozan T.N, 2021).

2.1.4.8 Pendapatan BUMD

Dalam kaitannya dengan studi ini, maka analisis pendapatan yang dipakai untuk menentukan pendapatan BUMD adalah analisis efektivitas dan analisis pertumbuhan.

a. Analisis efektivitas

Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut beroperasi secara efektif. Indikator efektivitas menunjukkan sejauh mana dampak dan konsekuensi (outcome) dari hasil (output) suatu program dalam mencapai tujuan program tersebut. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan, maka semakin efektif proses kerja dalam suatu unit organisasi. Dalam penelitian terkait efektivitas pengelolaan aset daerah di Provinsi Papua, mereka berpendapat bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pengelolaan dari hasil pemanfaatan aset daerah dipisahkan (Funangi, dkk, 2017).

b. Analisis Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan mengacu pada analisis komputasional sistematis atas upaya pertumbuhan perusahaan, menggunakan data untuk

menginformasikan keputusan dan strategi yang ditujukan untuk meningkatkan berbagai aspek kinerja bisnis. Analisis ini mencakup berbagai aktivitas dan metrik, termasuk akuisisi pengguna, retensi, keterlibatan, pertumbuhan pendapatan, perluasan pasar, dan pengembangan produk.

2.1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.5.1 Pengertian PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan pendapatan yang didapat oleh daerah dan dikumpulkan berdasarkan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. PAD menjadi salah satu sumber penerimaan yang dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah. Dalam proses pembangunan suatu wilayah, dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mendukung program-program tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah perlu menggali potensi yang dimilikinya guna membiayai pengeluaran rutin serta pembiayaan pembangunan daerah dalam sistem pengelolaan mandiri agar pendapatan daerah semakin meningkat. Keberadaan PAD dapat menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam aspek keuangan (Heince, dkk, 2019). Berbagai sumber yang dapat dikembangkan oleh daerah guna meningkatkan PAD antara lain pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil dari pengelolaan aset daerah yang telah dipisahkan, termasuk pendapatan yang bersumber dari

pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah, lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan yang didapat oleh pemerintah wilayah selain dari tiga macam penerimaan itu (Wulandari, Iryanie, 2017).

Salah satu jenis atau asal dari PAD yakni pendapatan pengurusan aset daerah yang terpisah. Jenis PAD ini dikenal dengan BUMD yang merupakan satu di antara asal pemasukan di wilayah. Perencanaan, identifikasi kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, penggunaan, perubahan status hukum, dan penatausahaan merupakan beberapa kegiatan dan tindakan yang terjadi dari pengelolaan aset daerah. Persentase keuntungan dari investasi modal pada perusahaan milik negara serta proporsi keuntungan dari investasi modal pada perusahaan milik daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan yang beragam. (Serafica, 2022 (Juni 4)).

Maksud dari keberadaan PAD ini yaitu untuk memberikan hak kepada pemerintah daerah guna membiayai penyelenggaraan pengelolaan mandiri daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Kementrian keuangan). Dengan adanya peningkatan PAD ini maka dapat memperlancar pembangunan dan pemerintahan daerah. Bukan hanya karena hal itu, tetapi juga untuk memberikan tingkat kemandirian pada daerah.

2.1.5.2 Strategi Peningkatan PAD

Menurut sofyan Assuri (2016) Dalam bukunya *Strategic Management Sustainable Competitive Advantages*, strategi dirancang

sebagai sasaran yang hendak diraih, usaha untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, bagaimana cara melaksanakannya, serta kepada siapa saja hal tersebut dikomunikasikan. Selain itu, penting untuk memahami alasan mengapa hasil kinerja tersebut perlu dievaluasi. Kurangnya efektivitas dalam upaya peningkatan serta perluasan yang dijalankan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu faktor rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa langkah strategi yang perlu diterapkan antara lain: melakukan pembaruan data terhadap subjek pajak guna meningkatkan penerimaan pajak daerah; membangun kemitraan dengan sektor swasta atau LSM dalam aspek pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah; memperbaiki tata kelola administrasi pajak daerah; memperluas cakupan objek pajak daerah; mengidentifikasi ulang visi serta mandat organisasi; serta mengimplementasikan sistem digitalisasi dalam penerimaan daerah (Utomo, 2017).

2.1.5.3 Analisis PAD

Untuk menilai kapasitas suatu daerah, diperlukan peran serta dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan jika dalam periode berjalan jumlah PAD yang diperoleh besar menentukan untuk APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya (Pekei, 2016). Analisis kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan laba BUMD dalam membantu pemasukan wilayah.

Perhitungan ini dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dari keuntungan BUMD dengan hasil aktual pemasukan PAD.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu/Tinjauan Empirik

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu dengan keterkaitan penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Ismail, Eja Armaz Hardi, Firmansyah Noor (2022).	Analisis Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (Studi Pada PDAM Tirta Batanghari)	Peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan pada berjalannya suatu pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis peran Badan Usaha Milik Daerah, dalam hal ini PDAM Tirta Batanghari. Sebagai salah satu BUMD yang berorientasi pada pelayanan air Bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum dan kebutuhan air lainnya.	Penelitian terdahulu dan peneliti saat ini, sama-sama bertujuan untuk deskriptif BUMD	Peneliti terdahulu membahas tentang peran BUMD dalam hal ini PDAM Tirta Batanghari untuk kebutuhan masyarakat sedangkan peneliti saat ini mendeskriptifkan BUMD dalam meningkatkan PAD.
2	Utri Dianniar (2023)	Analisis BUMD Terhadap	kontribusi penerimaan dari laba BUMD	Peneliti terdahulu dan peneliti saat	Pada peneliti terdahulu menjelaskan

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak.	terhadap PAD Kota Pontianak masih sangat kurang, dengan rata-rata selama lima tahun hanya mencapai 4,21% saja.	ini sama-sama memberikan penjelasan dalam peningkatan PAD.	kontribusi yang diberikan dalam meningkatkan PAD dan sedangkan peneliti saat ini mengkaji BUMD yang dapat meningkatkan PAD.
3	Nurmiati Nurmiati, Fina Diana, Murbayani Murbayani (2019).	Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	kontribusi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota makassar selama lima tahun terakhir secara rata-rata sebesar 1,73 atau berada pada kategori sangat kurang.	Para peneliti dari masa lalu dan masa kini meneliti seberapa baik BUMD bekerja untuk PAD.	Peneliti terdahulu menggunakan tiga teknik analisis data sedangkan peneliti saat ini menggunakan satu teknik analisis data.
4	Ruri Edita Anggraini, Yuni Putri Yustisi (2022)	Analisis Laporan Keuangan BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten (Studi Kasus Pada PT. BPR Bank Klaten (PERSERODA))	PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) dapat menjalankan tugasnya dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya. Walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan kinerja keuangan akibat adanya wabah virus COVID-19, tetapi perusahaan masih mampu menurunkan beban operasional lainnya dalam	Peneliti terdahulu dan peneliti saat ini menggunakan Teknik analisis Deskriptif Kuantitatif.	Peneliti terdahulu menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara sedangkan peneliti saat ini hanya menggunakan metode pengamatan lapangan dan metode berdasarkan document yang ada.

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			menghasilkan pendapatan dan mampu dalam mengelola modal yang diinvestasikan dalam seluruh aset untuk menghasilkan laba perusahaan. Sehingga PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) selaku BUMD tetap memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui laba perusahaan.		
5	Shely Puspita Sari, Muh. Yani Balaka, Syamsir Nur. (2021)	Studi Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan BUMD Dalam Upaya Peningkatan PAD Di Provinsi Sulawesi Tenggara	Kontribusi penerimaan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kategori yang sama dalam tahun 2014-2019 yaitu berada pada tingkat sangat kurang untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas penerimaan BUMD terhadap Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Peneliti terdahulu dan peneliti saat ini sama-sama menggunakan analisis data kontribusi dan efektivitas.	Peneliti saat ini menambahkan analisis data yaitu analisis pertumbuhan.

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			mulai pada tahun 2014-2019 berada pada kriteria yang berbeda. Pada tahun 2014 dan 2015 berada pada tingkat efektif sedangkan pada tahun 2016-2019 berada pada tingkat sangat efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kontribusi yaitu realisasi yang dihasilkan oleh masing-masing BUMD dan tingkat efektivitas pada BUMD antara lain adanya perbedaan target dan realisasi, adanya perbedaan penyertaan modal oleh pemerintah maupun pihak ketiga, jenis karakteristik usaha BUMD yang bersangkutan.		

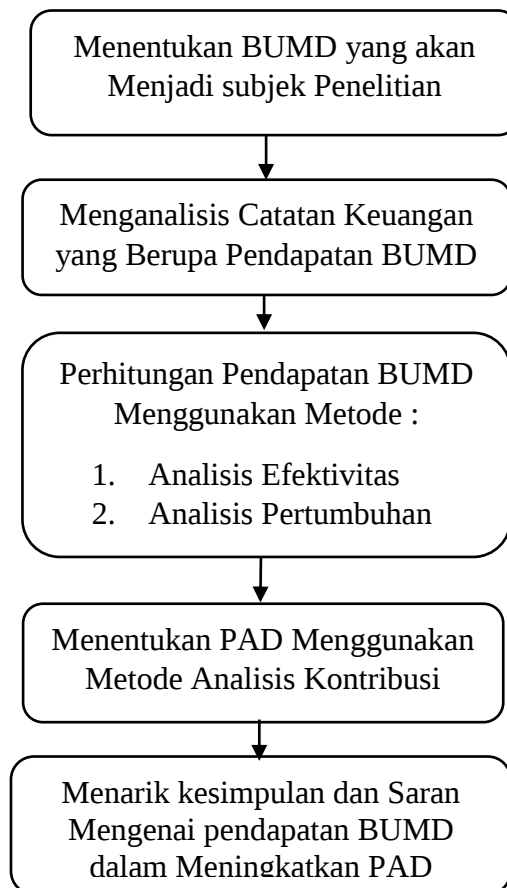
Sumber : Hasil Jurnal Ilmiah (2024)

2.3. Kerangka Konseptual

Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam sebuah daerah adalah tujuan atau pedoman utama bagi pemerintah dalam mengembangkan sebuah daerah. Dalam hal ini, sebuah daerah dengan pembangunan dan pengembangan

ekonomi membutuhkan sebuah dana dalam pelaksanaannya. BUMD adalah asset pemerintah daerah yang mestinya dipertahankan dalam dan dikembangkan dalam daerah. Memiliki potensi alam yang mampu mendukung berkembangnya BUMD ini menjadi tolak ukur pemerintah daerah untuk memajukan sebuah daerah. BUMD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berpotensi untuk meningkatkan PAD. Peningkatan PAD akan berpotensi dalam mengubah daerah menjadi daerah yang mandiri dan pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu, pemerintah harus meningkatkan sumber-sumber PAD dimana salah satu dari sumbernya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dan dengan demikian BUMD merupakan komponen yang mampu meningkatkan PAD.

Dalam penelitian ini, BUMD akan menjadi pusat analisis dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk membangun daerah melalui peningkatan PAD. Pada Kabupaten Mamasa sangat dikenal dengan minimnya PAD. Tahun ketahun Kabupaten Mamasa selalu mengalami kerugian dan minim pendapatan. Dalam kerangka pemikiran penelitian ini adalah potensi BUMD yang dapat meningkatkan minimnya PAD di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan Variabel Independen atau variable bebas dan digabungkan dengan variable dependen atau variable terikat, dimana BUMD sangat memberikan pengaruh pada peningkatan PAD. Berikut merupakan kerangka konseptual yang menjadi pedoman dalam penelitian ini



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa pendapatan BUMD dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Mamuju mulai dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan pendapatan yang tidak maksimal sehingga pendapatan BUMD tidak mencapai target yang diinginkan oleh daerah. perlu diketahui bahwa faktor BUMD yang ada di Kabupaten Mamuju terbilang masih sangat kurang sehingga pemerintah daerah masih belum mampu mengolah daerah mencapai tujuan yang diinginkan. Terlihat pada pembahasan bahwa efektivitas pendapatan BUMD mencapai persentase yang efektif dari tahun 2019-2023.

Pertumbuhan pendapatan laba BUMD menghasilkan pendapatan yang fluktuasi, dimana laba BUMD ini kadang naik dan kadang turun setiap tahunnya. Pertumbuhan pendapatan laba BUMD target penerimaannya tidak baik dan tidak mencapai target perusahaan. Kemudian hasil kontribusi BUMD dalam meningkatkan PAD tidak mencapai kemaksimalan yang cukup baik dari target penerimaan BUMD untuk pemerintah daerah. bahkan setiap tahunnya mengalami persentase yang sangat kurang.

Jadi setelah menganalisis pendapatan BUMD ini, maka terdapat hasil yaitu pendapatan BUMD belum mampu memberikan kontribusi pendapatan

yang sesuai dengan target penerimaan daerah, namun memberikan BUMD yang ada hanya beroperasi satu BUMD saja.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian adalah batas kemampuan peneliti dalam proses penelitian yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti :

1. Faktor Internal

- a. Keterbatasan waktu: waktu penelitian yang terbatas dapat mempengaruhi kedalaman dan keluasan penelitian.
- b. Keterbatasan biaya: biaya penelitian yang terbatas mempengaruhi penelitian dalam menjangkau waktu yang lebih lama untuk meneliti.
- c. Keterbatasan pengetahuan: keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti dapat mempengaruhi hasil penelitian.

2. Faktor eksternal

- a. Keterbatasan akses lokasi penelitian yang tidak aktif sehingga mempengaruhi hasil penelitian.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah (Pemda), diharapkan untuk lebih memperhatikan BUMD yang ada di daerah khususnya BUMD yang sudah tidak aktif dalam operasionalnya.

2. Bagi pemilik BUMD, diharapkan untuk meningkatkan pendapatan yang lebih dan memperbaiki penerimaan setiap tahunnya yang semakin menurun.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dukungan dan Kerjasama dalam meningkatkan PAD demi untuk kesejahteraan dan pembangunan dalam daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila V.M. (2023). Ap aitu Teori Ekonomi Klasik? Siapa Tokoh Utama dari Teori tersebut? Diakses Februari 4, 2025, dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-ekonomi-klasik/>
- Adam Smith. (1776). *Pertumbuhan Ekonomi*. Skotlandia: Program Studi Ekonomi Syariah.
- Ali Muhidin S. (2009). *Konsep Efektivitas Pembelajaran*. Bandung: Pustaka Setia
- Amdanata, D.D., Yusnadi, Mansor, N., Lestari, N.N. (2019). Implementasi Asas Transparansi Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Indonesia. *Inovbiz*, 7(2), 155-161.
- Andy Setiawan. (2022). *Financial Engineering Pada Bumd Air Minum*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Afandi, J. (2018, Mei 28). *Pengakuan Pendapatan Menurut SAK*. Artikel Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Diakses Juni 10, 2024.
- Afif S.Y, Rosma S. (2022). Ananlysis Of Financial Independence Ratio in Mamuju Regency. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*. 2(2), 82.
- Agung, A.P. & Yuesti, A. (Ed.). (2019). *Metode Penelitian Bisnis Kualitatif dan Kuantitatif* (1nd ed.). Kabupaten Bandung Bali, Indonesia: Noah Aletheia.
- Ahmad I, Eja A.H, Firmansyah N. (2022). Analisis Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada PDAM Tirta Batanghari). *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 1(4), 2962-0821.
- Akhmadi., Hidayah, S., Fitriadi. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartenegro. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 2548-9224.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (4nd ed). Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta
- Burhanudin. (2021). Human capital Theory Sebagai Landasan Teoritis. *Human Resource Development*. 13(1), 1-12.
doi:10.33747/jurnalstiesemarang
- Digdowniseiso, K., Rengganisa, A. (2023). Studi Literatur Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Mengangkat Perekonomian Ditengah Pandemi Covid19. *Jurnal Management Studies and Entrepreneurship*, 4(4), 4694-4702.
- Danang, S. (2012). *Analisis Validitas & Asumsi Klasik*. Yogyakarta: Gava Media.

- Donal D.A, Yusriadi, Noorhayati M, Nurul N.L. (2019). Implementasi Asas Transparansi Good Corporate Governance pada BUMD di Indonesia. *Jurnal Inovasi Bisnis*. 7(2), 159.
- Guritno, T. (1992). Kamus Ekonomi-bisnis-perbankan Inggris-Indonesia. (ed1) Yogyakarta: Gadjah Madah University Press
- Halim, A. dan Kusuf, M.S. 2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. (Ed1). Jakarta: Salemba Empat
- Hartoto, Sirly D.Y.P. (2024). Kontribusi BUMD Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus pada PT. Pelabuhan Kepri). *Jurnal Miftahul Ulum*. 2(2), 46-53.
- Handayani, Soewarno. (2016). Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Penerbit Gunung Agung
- Hidayat, (1986). Teori efektivitas dalam Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Jhoni L.S, Khairul S.D, Sarah C.N. (2022). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*. 3(2), 752.
- Fauzan T.N. (2021, Desember 1). Pengertian BUMD, Ciri-Ciri, Bentuk, Peran, Kelebihan Dan Kelemahannya. Diakses dari <https://www.bola.com/ragam/read/4724529/pengertian-bumd-ciri-ciri-bentuk-peran-kelebihan-dan-kelemahannya>
- Ferichatul Chusna. (2024, juli 10). Teori Keynesian Dalam Ekonomi. Diakses Juli 10, 2024, dari <https://invesro.id/teori-keynesian-dalam-ekonomi/>
- Funangi, U., Mollet, J.A., Bisay, C.M. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 43-62.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah* (1nd ed.). Yogyakarta, Indonesia:
- Halim, A., Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. (edisi ke 4). Jakarta, Salemba Empat
- Jurnal. (2022, Oktober 26). Diakses pada November 12, 2024, dari <https://indigo99.com/kembali-mencuat-ke-publik-dana-penyertaan-modal-bumd-sulbar-15-miliar/>

- Lindawati A.S., Puspita, M.E. (2015). Corporate Social Responsibility : Implikasi Stakeholder dan Legitimacy GAP dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multi Aradigma*, 6(1), 1-174.
- Nurmiati, Diana, F., Murbayani. (2019). Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Jurnal Universitas Indonesia*.
- Marxis. (2022, agustus 30). Sejarah Pemikiran Marxis. Diakses agustus 30, 2022, dari Studi Ekonomi.com
- Paul R, Robert L. (1986). Pengembalian yang Meningkat dan Pertumbuhan Jangka Panjang. *Jurnal Ekonomi Politik*, 94(5), 2-7
- Pekei, B. (2016). *Keuangan Daerah Pemerintahan: Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. (1nd ed.). Jakarta Pusat, Indonesia: Taushia.
- Remende, H.J., Vekie, A., Rumat., Debby., Rotinsulu. (2019). Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi di PT. Bank Sulutgo). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(1), 32-50.
- Robert M.S, Trevor W.S. (1965). Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan. Australia: Australian National University.
- Serafica Gischa. (2022, Juni 4). Pendapatan Asli Daerah: Penegertian Dan Jenisnya. Web.Kompas.com. Diakses April 20, 2024.
- Setiawan dan Riyardi. (2008). Model Pelayanan Publik yang Berkeadilan: Studi Empirik pada PDAM Kota Surakarta. Surakarta: Institute Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suardhika, N. (Ed). (2019). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif* (1nd ed.). Bandung Bali, Indonesia: Noah Aletheia.
- Sugi P. (2024, Januari 4). Residual Income dalam Akuntansi: Pengertian, Rumus, Contoh, dan Jenisnya. Diakses Januari 4, 2024, dari <https://kledo.com/blog/residual-income/>
- Simbolon, J.L., Daulay, K.S., Nainggolan, S.C. (2022). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sumatra Utara Tahu 2016-2021. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 750-759.
- Shely P.S, Muh. Y.B, Syamsir N. (2021). Studi Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan BUMD Dalam Upaya Peningkatan PAD Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 608-619.

- Sulistawati, W, Wahyudi, Trinuryono, S. (2022). Analisis (Deskriptif Kuantitatif) Motivasi Belajar Siswa Dengan Modal Blended (Earning) Dimasa Pandemic Covid19. *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 13(1), 2686-3243.
- Syafitri, A.T., Silalahi, A.D. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Bumi Dan Bagaimana Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan PAD Kota Medan. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 1(3), 341-354.
- Tedi M. (2024). Teori Pertumbuhan Ekonomi: define, konsep dan perspektif menurut para ahli, diakses desember, 26, 2024, dari Pengayaan.com
- Teori Klasik dalam Ekonomi. (2023). *Pengertian dan Sejarahnya*. Diakses November 12, 2024, dari <https://an-nur.ac.id/esy/teori-klasik-dalam-ekonomi-pengertian-dan-sejarahnya.html>
- Toni R.S. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah. Subbag SDM, Hukum dan Humas.
- Utomo, G.P. (2022). *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tanpa Membebani Masyarakat*. Jurnal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Utri Dianniar. (2023). Analisis Kontribusi BUMD Terhadap PAD Kota Pontianak. *Jurnal Abdi Equator*, 3(1), 25-41.
- Wulandari, P.A., Iryanie, E. (2017). *Pajak Daerah: Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)* (1nd ed). Yogyakarta, Indonesia: Deepublish
- Yahya, A.S., Rosma. (2022). *Analisis Of Financial Independence Ratio in Mamuju Regenci*. *Jurnal Jurima*, 2(2), 2827-8577.